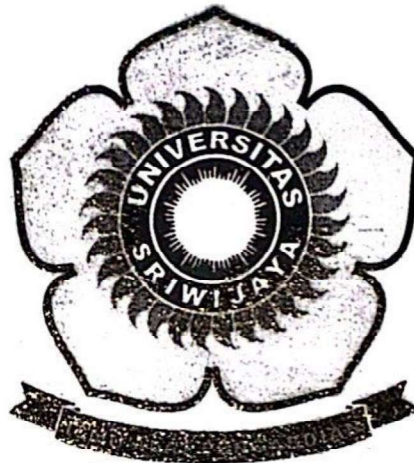


ASLI

JUR. EK. PEMBANGUNAN 19-4-2024
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

**PENGARUH ALOKASI ANGGARAN KESEJAHTERAAN DAERAH
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
PADA KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI
SUMATERA SELATAN**



Oleh :

MUTIARA DEWI

(01021382025133)

Ekonomi Pembangunan

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
PALEMBANG

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

**PENGARUH ALOKASI ANGGARAN KESEJAHTERAAN DAERAH TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

Disusun Oleh :

Nama : Mutiara Dewi
NIM : 01021382025133
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/ Konsentrasi : Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

TANGGAL : 05 Maret 2024



Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si
NIP. 197007162008012015

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH ALOKASI ANGGARAN KESEJAHTERAAN DAERAH
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Disusun oleh:

Nama : Mutiara Dewi
NIM : 01021382025133
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian : Keuangan Daerah

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 4 April 2024 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, 24 April 2024

Ketua

Anggota



Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si
NIP. 197007162008012015



Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si
NIP. 196903142014092001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

ASLI

JUR. EK. PEMBANGUNAN 24-4-2024
FAKULTAS EKONOMI UNSRI



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Mutiara Dewi
NIM : 01021382025133
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian : Keuangan Daerah
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul: **Pengaruh Alokasi Anggaran Kesejahteraan Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.**

Pembimbing : Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si
Tanggal Ujian : 4 April 2024

Adalah benar hasil karya sendiri, dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat sebelumnya dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Palembang, 24 April 2024

Pembuat pernyataan,



Mutiara Dewi
NIM.01021382025133

ASLI
JUR. EK. PEMBANGUNAN 24-4-2024
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“La Yukallifullahu nafsan illa wus aha”

(Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai

dengan kesanggupannya)

-Q.S Al-Baqarah, 2: 286-

“Fa inna ma’al usri Yusra”

(Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan)

-Q.S Al Insyirah, 94: 5-

“Segala sesuatu libatkan Allah SWT.”

-Mutiara Dewi-

PERSEMBAHAN

*“Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta,
Almarhumah adik perempuanku tersayang, adik laki-lakiku tersayang, seluruh
anggota keluarga, dan seluruh teman-teman yang selalu mendoakan dan
memberikan semangat”*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis hanturkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengaruh Alokasi Anggaran Kesejahteraan Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.”

Skripsi ini membahas mengenai Pengaruh Alokasi Anggaran Kesejahteraan Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak luput dari berbagai kendala dan hambatan. Akan tetapi, berkat dukungan, bimbingan, bantuan, dan saran yang tidak ternilai harganya dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih belum sempurna. Dengan demikian, penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Penulis juga mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Palembang, 24 April 2024



Mutiara Dewi
NIM. 01021382025133

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terimakasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya serta salam yang penuh hormat kepada pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan ucapan Terima Kasih kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'Ala pencipta semesta alam yang telah melimpahkan Rahmat, taufiq, hidayah dan inayyah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktu yang tepat.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Mohammad Adam, S.E., M.E selaku Dekan Fakultas Ekonomi.
4. Bapak Dr. Mukhlis, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan.
5. Bapak Dr. Imam Asngari, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing akademik saya yang telah membimbing selama perkuliahan.
6. Ibu Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, dan saran sehingga skripsi ini terselesaikan.

7. Ibu Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si selaku dosen penguji proposal skripsi dan komprehensif saya yang telah memberikan kritik dan saran untuk memperbaiki skripsi.
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pembelajaran, dan berbagai pengalaman selama masa perkuliahan.
9. Seluruh staff kepegawaian administrasi dan seluruh karyawan Universitas Sriwijaya yang telah membantu dalam hal akademik selama perkuliahan.
10. Kedua orang tua saya tercinta, Ayah Yurizal Kodri dan Ibu Hartini yang telah mengorbankan waktu, tenaga, memberikan kasih sayang yang tidak pernah usai, serta memberikan dukungan dan doa.
11. Adik laki-laki saya tersayang Muhamad Ilham Alfarizi, dan Almarhumah adik perempuan saya tersayang Delivia Azzalia yang telah memberikan semangat, dorongan, hiburan, serta doa yang tiada henti.
12. Kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan, dan doa selama pendidikan.
13. Bripda Dheo Rangga Pradifta Mursalin yang selalu menemani dan selalu menjadi support system saya, menemani dalam keadaan suka maupun duka, yang selalu mendengarkan keluh kesah saya, memberi dukungan, motivasi, pengingat untuk terus maju tanpa kenal menyerah dalam segala hal untuk meraih apa yang menjadi impian saya.

14. Kepada sahabat saya Izza, Caca, Fiza, Devi, Aliyah, Prames, Fuja, Suci, Ina, Sarah yang selalu memberikan semangat dan menjadi teman berkeluh kesah.
15. Teman-teman kuliah saya, Nia, Diani, Della, Novita, Zharika, Neta, Ocha, Rahma, Tias, Arsita, yang sudah memberikan semangat serta membantu dalam perkuliahan.
16. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Pembangunan Angkatan 2020 terutama kampus Palembang, terima kasih atas segala pembelajarannya, kerjasama, canda, tawa, semoga kita bertemu di versi terbaik dari diri kita dimasa depan.
17. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri Mutiara Dewi, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Palembang, 24 April 2024



Mutiara Dewi
NIM. 01021382025133

ABSTRAK

PENGARUH ALOKASI ANGGARAN KESEJAHTERAAN DAERAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

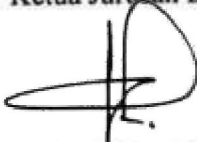
Oleh :

Mutiara Dewi; Anna Yulianita

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh alokasi anggaran kesejahteraan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat pada Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Pendekatan yang digunakan yaitu kuantitatif dengan jenis data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) selama 10 tahun (2013-2022). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan menggunakan *Random Effect Model* (REM) beserta hasil analisis individu tiap kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan variabel anggaran fungsi pendidikan, anggaran fungsi kesehatan, anggaran fungsi ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : kesejahteraan masyarakat, anggaran fungsi pendidikan, anggaran fungsi kesehatan, anggaran fungsi ekonomi.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001

Dosen Pembimbing



Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si
NIP. 197007162008012015

ABSTRACT

THE EFFECT OF REGIONAL WELFARE BUDGET ALLOCATION ON COMMUNITY WELFARE IN DISTRICTS / CITIES IN SOUTH SUMATRA PROVINCE

By :

Mutiara Dewi; Anna Yulianita

This study aims to analyze the effect of regional welfare budget allocation on community welfare in districts / cities in South Sumatra Province. The approach used is quantitative with secondary data types obtained from the Central Statistics Agency (BPS), and the Directorate General of Financial Balance (DGT) for 10 years (2013-2022). The analysis technique used in this study is regression of panel data using Random Effect Model (REM) along with the results of individual analysis of each district and city in South Sumatra Province. The results showed that the variables of the education function budget, health function budget, economic function budget have a positive and significant influence on public welfare.

Keywords: public welfare, education function budget, health function budget, economic function budget.

Knowing,
Head of Economic Development Program



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001

Advisor



Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si
NIP. 197007162008012015

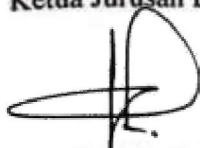
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Kami Dosen Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa abstraksi skripsi dari mahasiswa:

Nama : Mutiara Dewi
NIM : 01021382025133
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Mata Kuliah : Keuangan Daerah
Judul Skripsi : Pengaruh Alokasi Anggaran Kesejahteraan Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan

Telah kami periksa cara penulisan, grammar, maupun susunan tensesnya dan kami setuju untuk di tempatkan pada lembar abstrak.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001

Dosen Pembimbing



Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si
NIP. 197007162008012015

DATA PRIBADI

Nama : Mutiara Dewi
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Enim/ 21 November 2002
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Jl. Permai 3 Rt004/Rw002 Kel.Pasar 2 Kec. Muara
Enim Kab.Muara Enim/ 31315
Alamat Email : mutiaradewi.92.smpn1.me@gmail.com
No Hp : 087749391718



PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2008-2014 : SD Negeri 6 Muara Enim
Tahun 2014-2017 : SMP Negeri 1 Muara Enim
Tahun 2017-2020 : SMA Negeri 1 Unggulan Muara Enim
Tahun 2020-2024 : S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
Universitas Sriwijaya

PENDIDIKAN NON FORMAL

Tahun 2022-2023 : Kursus Bahasa Inggris Amikom Palembang
Tahun 2022-2023 : Kursus Komputer Amikom Palembang

PENGALAMAN ORGANISASI

Tahun 2018-2019 : Purna Paskibraka Indonesia (PPI)
Kabupaten Muara Enim
Tahun 2019-2020 : Bujang Gadis Serasan Kabupaten Muara Enim

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS ILMIAH	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK.....	xii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian.....	13
1.4. Manfaat Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1. Landasan Teori	16
2.1.1. Teori Negara Kesejahteraan	16
2.1.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (<i>Human Development Theory</i>).....	18
2.1.3. Teori Pengeluaran Pemerintah.....	21
2.2. Definisi dan Konsep	23
2.2.1. Alokasi Anggaran kesejahteraan Daerah.....	23

2.3. Penelitian Terdahulu.....	27
2.4. Kerangka Pemikiran	34
2.5. Hipotesis Penelitian	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	37
3.1. Ruang Lingkup Penelitian	37
3.2. Jenis dan Sumber Data	37
3.3. Teknik Analisis Data	38
3.3.1. Estimasi Data	39
3.3.2. Pemilihan Model Terbaik	40
3.3.3. Pengujian Asumsi Klasik.....	41
3.3.4. Pengujian Hipotesis	43
3.4. Definisi Operasional	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
4.1. Gambaran Umum	47
4.1.1. Kondisi Geografis dan Wilayah Administratif.....	47
4.1.2. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia.....	48
4.1.3. Perkembangan Anggaran Fungsi Pendidikan	51
4.1.4. Perkembangan Anggaran Fungsi Kesehatan.....	54
4.1.5. Perkembangan Anggaran Fungsi Ekonomi.....	57
4.2. Hasil Penelitian.....	60
4.2.1. Pemilihan Model Regresi Data Panel	60
4.2.1.1. Uji Chow (<i>redundant likelihood ratio</i>).....	61
4.2.1.2. Uji Hausman (<i>correlated random effect – Hausman Model</i>).....	61
4.2.1.3. Uji <i>Lagrange Multiplier</i> (Breusch-pagan).....	62
4.2.2. Hasil Regresi Data Panel.....	62
4.2.3. Uji Asumsi Klasik	64
4.2.3.1. Uji Normalitas.....	64
4.2.3.2 Uji Heteroskedastisitas.....	65
4.2.3.3. Uji Multikolinearitas	66
4.2.4. Analisis Individu	66

4.2.5. Uji Signifikansi.....	69
4.2.5.1. Uji t	69
4.2.5.2. Uji F	70
4.2.5.3. Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	71
4.2.6 Pembahasan	71
4.2.6.1 Pengaruh Anggaran Fungsi Pendidikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat.....	71
4.2.6.2. Pengaruh Anggaran Fungsi Kesehatan terhadap Kesejahteraan Masyarakat.....	73
4.2.6.3. Pengaruh Anggaran Fungsi Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat.....	74
4.2.6.4. Pengaruh Anggaran Fungsi Pendidikan, Anggaran Fungsi Kesehatan, Anggaran Fungsi Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat.....	76
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	78
5.1. Kesimpulan.....	78
5.2. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan 2018-2022.....	2
Tabel 4.1	Wilayah administratif Provinsi Sumatera Selatan.....	48
Tabel 4.2	Pertumbuhan Anggaran Fungsi Pendidikan pada Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.....	52
Tabel 4.3	Pertumbuhan Anggaran Fungsi Kesehatan pada Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.....	56
Tabel 4.4	Pertumbuhan Anggaran Fungsi Ekonomi pada Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.....	59
Tabel 4.5	Uji Chow (<i>redundant likelihood ratio</i>)	61
Tabel 4.6	Uji Hausman (<i>correlated random effect – Hausman Model</i>).....	61
Tabel 4.7	Uji <i>Lagrange Multiplier</i> (Breusch-pagan)	62
Tabel 4.8	Model Random Effect	63
Tabel 4.9	Uji Heteroskedastisitas	65
Tabel 4.10	Uji Multikolinearitas	66
Tabel 4.11	Hasil Analisis Individu Kabupaten/kota	67
Tabel 4.12	Uji t.....	69
Tabel 4.13	Uji F.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Realisasi Belanja Daerah Fungsi Pendidikan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan 2018-2022.....	4
Gambar 1.2 Realisasi Belanja Daerah Fungsi Kesehatan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan 2018-2022.....	7
Gambar 1.3 Realisasi Belanja Daerah Fungsi Ekonomi Kabupaten /Kota Provinsi Sumatera Selatan 2018-2022.....	10
Gambar 2.1 Kurva Pengeluaran Pemerintah Wagner.....	22
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	35
Gambar 4.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan	49
Gambar 4.2 Pertumbuhan Anggaran Fungsi Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.....	51
Gambar 4.3 Pertumbuhan Anggaran Fungsi Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.....	55
Gambar 4.4 Pertumbuhan Anggaran Fungsi Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan.....	58
Gambar 4.5 Hasil Uji Normalitas.....	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.	88
Lampiran 2. Wilayah Administratif Provinsi Sumatera Selatan.	92
Lampiran 3. Hasil Estimasi Regresi Data Panel	93
Lampiran 4. <i>Chow Redundant Test</i>	95
Lampiran 5. <i>Hausman Test</i>	96
Lampiran 6. <i>Lagrange Multiplier Test</i>	97
Lampiran 7. Regresi Data Panel	98
Lampiran 8. Uji Asumsi Klasik	99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Alokasi anggaran kesejahteraan daerah adalah proses penentuan dan penyaluran dana atau sumber daya keuangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada tingkat daerah atau lokal, alokasi anggaran kesejahteraan daerah dapat mencakup berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan layanan sosial lainnya (DJPK, 2010).

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat baik melalui program-program yang diadakan dan di susun oleh pemerintah, maupun kebutuhan dasar yang telah terpenuhi oleh usaha-usaha yang dilakukan masyarakat (Aferiaman, 2022). Kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui berbagai indikator yang saling terkait, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan (Sayifulllah, 2016).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu gabungan dari tiga parameter, yaitu: angka harapan hidup saat lahir (*life expectancy at birth*), tingkat melek huruf dewasa (*adult literacy rate*), dan rata-rata tahun sekolah (*mean years of schooling*), serta daya beli paritas (*purchasing power parity*). Komponen angka harapan hidup mengukur aspek kesehatan, sedangkan tingkat melek huruf dewasa dan rata-rata tahun sekolah menggambarkan tingkat pendidikan. Terakhir, daya beli paritas digunakan untuk menilai standar hidup (Kuncoro, 2004). Indikator-indikator tersebut sering digunakan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia untuk mengevaluasi

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayahnya, termasuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang menempatkan nilai IPM mereka pada kisaran menengah antara 50-79,9. Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan 2018-2022

No	Kabupaten/ Kota	Indeks Pembangunan Manusia (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Sumatera Selatan	69.39	70.02	70.01	70.24	70.90
2	Ogan Komering Ulu	69.01	69.45	69.32	69.60	70.24
3	Ogan Komering Ilir	66.57	66.96	66.82	67.17	68.02
4	Muara Enim	68.28	68.88	68.74	68.86	69.43
5	Lahat	66.99	67.62	67.44	67.58	68.40
6	Musi Rawas	66.18	66.92	66.79	67.01	67.78
7	Musi Banyuasin	67.57	67.83	67.69	68.10	68.60
8	Banyuasin	66.40	66.90	66.74	67.13	67.93
9	OKU Selatan	64.84	65.43	65.30	65.34	65.87
10	OKU Timur	68.58	69.34	69.28	69.58	70.23
11	Ogan Ilir	66.43	67.22	67.06	67.17	67.96
12	Empat Lawang	64.81	65.10	65.25	65.39	66.00
13	Pali	63.49	64.33	64.70	64.88	65.75
14	Musi Rawas Utara	63.75	64.32	64.49	64.93	65.74
15	Palembang	77.89	78.44	78.33	78.72	79.47
16	Prabumulih	74.04	74.40	74.55	74.67	75.52
17	Pagar Alam	67.62	68.44	68.31	68.68	69.60
18	Lubuk Linggau	74.09	74.81	74.78	74.89	75.53

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk berbagai Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan pada periode 2018-2022 menunjukkan variasi tingkat kesejahteraan di berbagai wilayah. Sumatera Selatan, sebagai entitas keseluruhan

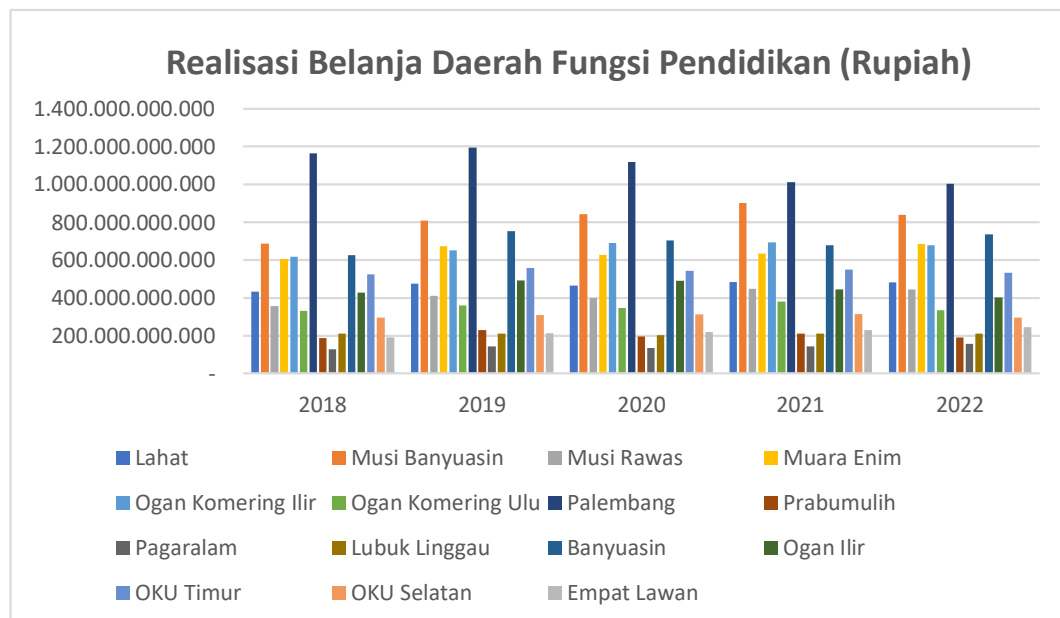
mengalami peningkatan IPM dari 69.39 persen pada tahun 2018 menjadi 70.90 persen pada tahun 2022, mencerminkan perkembangan positif dalam indikator kesejahteraan. Kabupaten Ogan Komering Ulu juga menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari 69.01 persen pada tahun 2018 menjadi 70.24 persen pada tahun 2022. Sementara itu, Kabupaten/Kota lainnya seperti Ogan Komering Ilir, Muara Enim, dan Lahat juga mencatat peningkatan, menunjukkan upaya pembangunan yang terus menerus. Namun, terdapat variasi dalam tingkat IPM antar Kabupaten/Kota. Kabupaten Pali dan Musi Rawas Utara, meskipun mengalami kenaikan, memiliki IPM yang masih di bawah rata-rata provinsi. Sebaliknya, Kota Palembang dan Prabumulih menonjol dengan IPM di atas rata-rata, mencapai 79.47 persen dan 75.52 persen pada tahun 2022, berturut-turut.

Tingkat kenaikan IPM yang relatif konsisten menunjukkan adanya upaya pembangunan di tingkat daerah. Meskipun demikian, perbedaan IPM antar daerah masih cukup signifikan, menunjukkan adanya disparitas pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti investasi dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi lokal.

Salah satu cara kebijakan pemerintah daerah dilaksanakan adalah melalui pengendalian alokasi dan percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang tidak hanya mencakup sumber pendanaan daerah tetapi juga berbagai pengeluaran pemerintah, seperti kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran lainnya yang pada dasarnya merupakan investasi di daerah lain. Pengeluaran

pemerintah untuk kesehatan dan pendidikan akan meningkatkan kualitas modal manusia, yang akan menarik investasi dari sektor swasta (Jhingan, 2000).

Hubungan antara alokasi anggaran kesejahteraan daerah dan realisasi belanja daerah per fungsi sangat erat kaitannya dengan efektivitas dan dampak pembangunan di tingkat lokal, dengan merinci pengeluaran aktual pada fungsi pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan layanan sosial lainnya, pemerintah dapat memahami sejauh mana alokasi anggaran dapat memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat (DJPK, 2010). Realisasi belanja daerah per fungsi dapat menilai sejauh mana alokasi anggaran yang telah mendukung aspek kesejahteraan masyarakat serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Realisasi belanja daerah fungsi pendidikan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2024

Gambar 1.1 Realisasi Belanja Daerah Fungsi Pendidikan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan 2018-2022

Pada Gambar 1.1 merupakan realisasi belanja daerah fungsi pendidikan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2018, realisasi belanja daerah fungsi pendidikan menunjukkan ketidakseimbangan yang cukup mencolok di sejumlah daerah di Sumatera Selatan. Palembang menjadi pusat perhatian dengan realisasi belanja daerah fungsi pendidikan mencapai 1.162 triliun rupiah, jauh melampaui daerah lain seperti Lahat dan Muara Enim. Perbedaan ini bisa mengindikasikan perbedaan prioritas dan kebutuhan dalam sektor pendidikan antar-daerah. Sementara itu, Pagaralam dan Empat Lawang mencatat realisasi belanja daerah yang relatif rendah, yang memerlukan perhatian lebih lanjut dalam meningkatkan investasi pendidikan. Peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2019, dengan Palembang tetap menjadi pemimpin dalam realisasi belanja daerah fungsi pendidikan, mencapai 1.194 triliun rupiah. Sebagian besar daerah juga menunjukkan peningkatan yang baik, mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan investasi dalam pendidikan. Meskipun demikian, distribusi anggaran masih bervariasi, dan beberapa daerah seperti Pagaralam dan Empat Lawang tetap menghadapi tantangan untuk mencapai tingkat realisasi yang optimal.

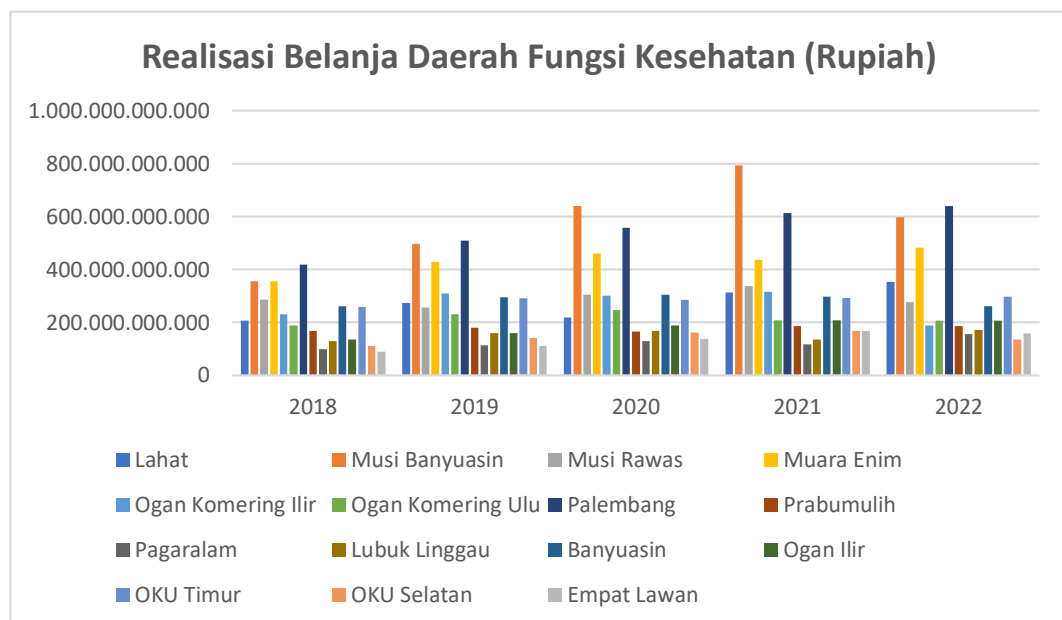
Tahun 2020 membawa tantangan baru dengan munculnya pandemi *Covid-19*. Beberapa daerah, seperti Lahat dan Muara Enim, mengalami penurunan realisasi belanja daerah fungsi pendidikan, yang mungkin merupakan respons terhadap tekanan fiskal dan perubahan prioritas di tengah krisis. Di sisi lain, Palembang dan Lubuk Linggau mengalami peningkatan, mencerminkan upaya untuk menjaga kualitas pendidikan di tengah ketidakpastian yang meningkat. Tahun 2021 melanjutkan tren peningkatan, dengan Palembang tetap sebagai

penerima realisasi belanja daerah fungsi pendidikan terbesar. Namun, beberapa daerah seperti Empat Lawang dan OKU Timur mengalami penurunan, mungkin akibat dari dampak berkelanjutan pandemi dan perubahan prioritas pemerintah daerah. Kesenjangan antar-daerah masih terlihat, dan pihak berwenang perlu terus melakukan evaluasi untuk memastikan distribusi belanja daerah yang lebih merata.

Pada tahun 2022, walaupun terdapat penurunan di beberapa daerah seperti OKU Timur dan Banyuasin, Palembang tetap menjadi penerima realisasi belanja daerah terbesar di sektor pendidikan. Variasi dalam alokasi anggaran ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan kebijakan, dinamika ekonomi, dan kondisi lokal yang berkembang. Perubahan-perubahan ini menunjukkan perlunya adaptasi dan fleksibilitas dalam merencanakan alokasi anggaran pendidikan di masa depan. Hubungannya dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), peningkatan pelaksanaan belanja daerah fungsi pendidikan memiliki potensi dampak positif yang signifikan terhadap perbaikan Indeks Pembangunan Manusia. Ketika belanja daerah fungsi pendidikan dilakukan dengan memadai dan efisien, sektor pendidikan mampu meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan secara keseluruhan. Melalui peningkatan akses dan mutu tersebut, dan diperoleh manfaat yang berkelanjutan dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat (Nurrizki, 2022).

Di sisi lain, secara umum, anggaran yang memadai untuk fungsi kesehatan juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana yang cukup untuk layanan kesehatan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, mengurangi angka penyakit, dan meningkatkan

harapan hidup (Mahendra, 2020). Dengan demikian, penting bagi pemerintah daerah untuk mempertimbangkan anggaran yang seimbang antara pendidikan dan kesehatan guna mencapai pembangunan manusia yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan. Realisasi belanja daerah fungsi kesehatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018-2022 dapat dilihat dalam Gambar 1.2.



Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2024

Gambar 1.2 Realisasi Belanja Daerah Fungsi Kesehatan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan 2018-2022

Realisasi belanja daerah fungsi kesehatan pada tahun 2018-2022 di berbagai Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan variasi yang signifikan. Pada tahun 2018, Kota Palembang menjadi yang memiliki realisasi belanja daerah tertinggi sebesar Rp 417.295.138.099, mengungguli kabupaten-kabupaten lain seperti Musi Banyuasin, Muara Enim, dan Kota Prabumulih. Pada tahun 2019, terjadi peningkatan signifikan di seluruh wilayah, dengan Kota

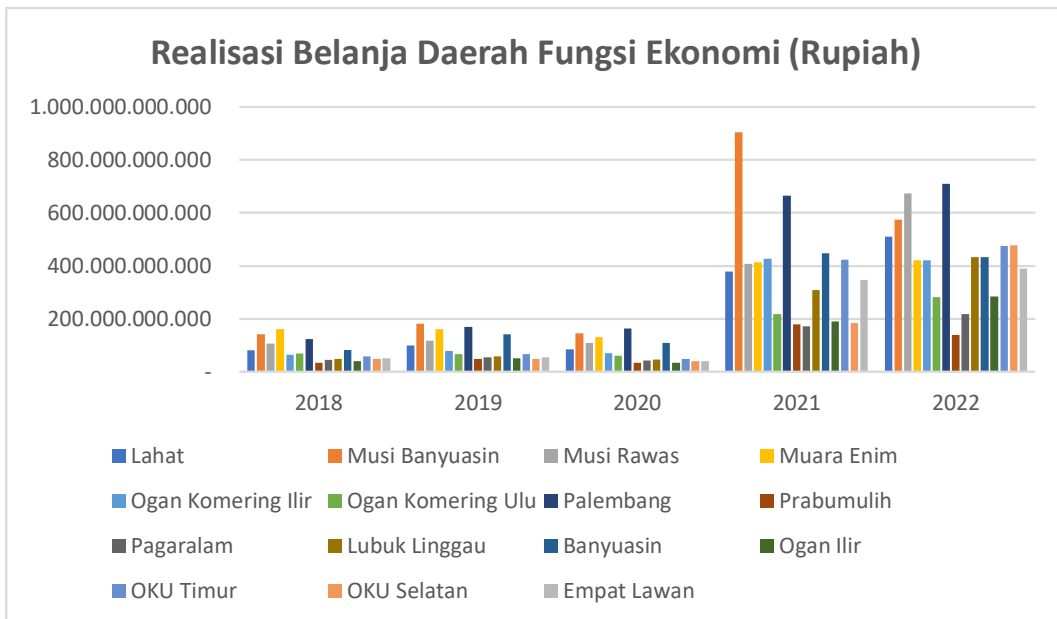
Palembang kembali menduduki peringkat tertinggi mencapai Rp 508.158.962.702. Tren kenaikan juga terlihat di beberapa kabupaten seperti Musi Banyuasin dan Muara Enim. Perlu dicatat bahwa tahun ini menjadi titik awal percepatan realisasi belanja daerah fungsi kesehatan di banyak daerah.

Tahun 2020 menunjukkan variasi yang signifikan, dengan Kabupaten Musi Banyuasin mencapai angka tertinggi sepanjang periode tersebut, yaitu Rp 639.207.943.507,73. Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim tetap berada di posisi tinggi. Adanya peningkatan ini mungkin dapat dihubungkan dengan upaya penanganan kesehatan terkait pandemi *Covid-19* dan peningkatan kesadaran akan pentingnya sektor kesehatan. Pada tahun 2021, realisasi belanja daerah fungsi kesehatan terus meningkat di seluruh daerah. Kota Palembang tetap menjadi yang tertinggi dengan nilai Rp 613.736.977.178,48, menggambarkan komitmen pemerintah setempat terhadap kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Musi Banyuasin dan Kota Prabumulih juga mencatat peningkatan yang cukup mencolok, menunjukkan fokus pada sektor kesehatan di tengah kondisi kesehatan global yang masih tidak pasti.

Pada tahun 2022, data menunjukkan bahwa Kota Palembang masih memimpin dengan realisasi belanja daerah sebesar Rp 352.999.821.257, meskipun terjadi perubahan dalam peringkat beberapa daerah. Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih mengalami peningkatan yang signifikan, sementara beberapa daerah seperti Kabupaten Lahat dan Empat Lawang mengalami penurunan. Faktor-faktor ekonomi, kebijakan pemerintah, dan kebutuhan kesehatan masyarakat mungkin menjadi faktor utama yang memengaruhi perubahan ini. Penurunan

anggaran kesehatan dalam beberapa daerah dapat berdampak negatif pada aspek kesehatan penduduk, yang dapat mempengaruhi indikator kesejahteraan seperti angka harapan hidup. Oleh karena itu, perlu diupayakan peningkatan anggaran kesehatan guna mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di tingkat daerah (Lengkong, 2019).

Selain itu, realisasi belanja daerah fungsi ekonomi memiliki keterkaitan yang erat dengan sektor kesehatan dan pendidikan. Dengan mengalokasikan sumber daya ke sektor ekonomi, seperti infrastruktur dan pengembangan industri, dapat tercipta lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berdampak positif pada pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan ini dapat mendukung anggaran kesehatan dan pendidikan. Secara khusus, pertumbuhan ekonomi yang stabil dapat meningkatkan kemampuan pemerintah untuk memberikan dana yang memadai untuk sektor kesehatan dan pendidikan, menghasilkan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Bandiyono, 2018). Realisasi belanja daerah fungsi ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018-2022 dapat diamati dalam Gambar 1.3.



Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2024

Gambar 1.3 Realisasi Belanja Daerah Fungsi Ekonomi Kabupaten /Kota Provinsi Sumatera Selatan 2018-2022

Realisasi belanja daerah fungsi ekonomi pada tahun 2018-2022 untuk beberapa wilayah di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2018, terlihat bahwa sebagian besar daerah menunjukkan tingkat realisasi yang beragam, dengan Lahat dan Musi Rawas memimpin dalam pengeluaran. Perbedaan ini mungkin mencerminkan prioritas pembangunan dan proyek-proyek strategis yang berbeda di setiap daerah. Pada tahun 2019, terjadi lonjakan signifikan dalam realisasi belanja daerah fungsi ekonomi di banyak daerah, mencerminkan mungkin adanya proyek-proyek besar atau peningkatan dalam sektor-sektor ekonomi tertentu. Musi Banyuasin, Musi Rawas, dan Palembang menunjukkan peningkatan yang mencolok dalam realisasi belanja daerah fungsi ekonomi. Hal ini mungkin sejalan dengan strategi pembangunan yang lebih agresif atau kebijakan fiskal yang lebih besar di tingkat daerah.

Namun, pada tahun 2020, terjadi perubahan dinamika yang signifikan. Beberapa daerah, seperti Muara Enim, Ogan Komering Ilir, dan Prabumulih, mengalami penurunan realisasi belanja daerah fungsi ekonomi yang dapat dikaitkan dengan dampak pandemi *Covid-19*. Kondisi ekonomi yang tidak pasti dan ketidakpastian global mungkin telah mempengaruhi kemampuan daerah untuk mengimplementasikan proyek-proyek besar. Tahun 2021 menunjukkan perubahan yang dramatis. Daerah-daerah seperti Lahat, Musi Banyuasin, dan Palembang kembali menjadi sorotan dengan peningkatan yang signifikan dalam realisasi belanja daerah fungsi ekonomi.

Pada tahun 2022, variabilitas dalam realisasi belanja daerah fungsi ekonomi tetap menjadi tema utama. Daerah-daerah seperti Lahat dan Musi Banyuasin terus menunjukkan peningkatan yang konsisten, sementara daerah lain seperti Muara Enim dan Ogan Komering Ilir mengalami penurunan. Realisasi belanja daerah fungsi ekonomi dapat berpotensi memberikan dampak positif pada IPM jika dana yang efektif digunakan untuk pengembangan sektor-sektor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan (Rafika, 2017).

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan menghadapi sejumlah permasalahan terkait alokasi anggaran kesejahteraan daerah, yang berpotensi mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Terlihat adanya ketidakseimbangan antara anggaran dan kebutuhan riil masyarakat, menyebabkan beberapa daerah mungkin mengalami keterbatasan dalam peningkatan aspek kritis seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Selain itu, beberapa kabupaten/kota

juga dapat menghadapi tantangan terkait kurangnya transparansi dalam penggunaan dana atau kurangnya fokus pada sektor-sektor yang secara signifikan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari Aditia dan Dewi (2018) Namun, perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah (1) penelitian sebelumnya dilakukan di Provinsi Bali, yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang berbeda dengan Provinsi Sumatera Selatan, (2) penelitian sebelumnya fokus pada pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pembaruan penelitian perlu memperluas cakupan variabel untuk mencakup alokasi anggaran kesejahteraan daerah dan dampaknya pada berbagai indikator kesejahteraan masyarakat, termasuk tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, serta ekonomi (3) penelitian sebelumnya menggunakan data dari Provinsi Bali. Pembaruan penelitian memerlukan pengumpulan data yang spesifik untuk Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, termasuk data belanja daerah per fungsi, dan data IPM.

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh alokasi anggaran kesejahteraan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Temuan penelitian ini dapat menjadi landasan untuk perbaikan kebijakan dalam alokasi anggaran di tingkat provinsi dan memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi pada literatur ilmiah tentang ekonomi daerah dan pengelolaan anggaran publik.

Dengan melakukan pembaruan penelitian sesuai dengan aspek-aspek diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“Pengaruh Alokasi Anggaran Kesejahteraan Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan”**.

1.2. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh anggaran fungsi pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan ?
2. Bagaimana pengaruh anggaran fungsi kesehatan terhadap kesejahteraan masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan ?
3. Bagaimana pengaruh anggaran fungsi ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan ?
4. Bagaimana pengaruh anggaran fungsi pendidikan, anggaran fungsi kesehatan, anggaran fungsi ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis :

1. Pengaruh anggaran fungsi pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pengaruh anggaran fungsi kesehatan terhadap kesejahteraan masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

3. Pengaruh anggaran fungsi ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Pengaruh anggaran fungsi pendidikan, anggaran fungsi kesehatan, anggaran fungsi ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan manfaat dari penelitian ini yaitu :

- a) Memberikan pemahaman tentang pengaruh alokasi anggaran kesejahteraan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.
- b) Membantu mengidentifikasi sektor-sektor atau fungsi-fungsi khusus di mana anggaran dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
- c) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan model pembangunan berkelanjutan dengan merinci konsep-konsep teoritis yang mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan manfaat dari penelitian ini yaitu :

- a) Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh alokasi anggaran kesejahteraan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

- b) Memberikan panduan kebijakan yang terarah dengan mengungkapkan kontribusi sektor-sektor tertentu terhadap peningkatan kesejahteraan.
- c) Membantu dalam mengidentifikasi area-area dimana program dan proyek pembangunan dapat dioptimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditia, Ngakan Made Agung, & Ni Putu Martini Dewi. (2018). "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ekonomi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Bali." *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 7(2), 212-242.
- Aferiaman, Telaumbanua, & Ziliwu Noferius. (2022). "Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi (Jamane)*, 1(1), 108-123.
- Andersen, R. M. (1995). Revisiting The Behavioral Model And Access To Medical Care: Does It Matter? *Journal of health and social behavior*, 1-10.
- Andiny, Puti, & Merlindiana Gus Puja Sari. (2018). "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Langsa." *Jurnal Samudra Ekonomika*, 2(2), 116-125.
- Anshori, Muslich, & Sri Iswati. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Edisi 1*. Airlangga University Press.
- Anwar, Khoirul. (2014). "Analisis Dampak Defisit Anggaran Terhadap Ekonomi Makro di Indonesia." *Jejaring Administrasi Publik*, 2, 588-603.
- Arifah, Umi. (2018). "Kebijakan Publik Dalam Anggaran Pendidikan." *Cakrawala Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial*, 2(1), 17-37.
- Arsyad, Lincoln. (2010). *Ekonomi Pembangunan Edisi Kelima*. STIE YKPN, Yogyakarta.
- Arwati, Dini, & Novita Hadiati. (2013). "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat." *Semantik*, 3(1).
- Asghar Nabeela, Hussain Zakir, Ur Rehman Hafeez. (2012). "The Impact Of Government Spending On Poverty Reduction: Evidence From Pakistan 1972 To 2008." *African Journal of Business Management*, 6(3), 845-853.
- Badan Pusat Statistik. (2021). "Indeks Pembangunan Manusia 2015-2021." Badan Pusat Statistik Jakarta.
- Bandiyono, Agus, (2018). "Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Fungsi Terhadap Peningkatan IPM dan Pengentasan Kemiskinan (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh)." *Info Artha 2.1*: 11-28.

- Cangiano, Mr M., Ms Teresa R. Curristine, dan Mr Michel Lazare. (2013). *Public Financial Management and its Emerging Architecture. International Monetary Fund.*
- Craigwell Roland, Bynoe Danielle, Lowe Shane. (2012). "The Effectiveness Of Government Expenditure On Education And Health Care In The Caribbean." *International Journal of Development Issues*, Vol. 11 Iss:1: 4–18. Emerald.
- Didu, Saharuddin, dan Ferri Fauzi. (2016). "Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lebak." *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan* 6(1):102–17. doi: 10.35448/jequ.v6i1.4199.
- DJPK. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*. Retrieved from Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; <https://jdih.kemenkeu.go.id>
- Dwirandra, A. A. N. B. (2013). "Pengaruh Desentralisasi Fiskal Pada Pertumbuhan Ekonomi Dengan Keserasian Belanja Daerah Sebagai Variabel Pemoderasi." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis* 8.2: 66-74.
- Eneji, Mathias Agri, Vonke Juliana Dickson, dan Bisong John Onabe. (2013). "Health Care Expenditure, Health Status And National Productivity In Nigeria (1999-2012).
- Fadliyah, Chairati, dan Mike Triani. (2019). "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pendidikan Dan Infrastruktur Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia." *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan* 1.3: 789-796.
- Fauzi, Akhmad. (2019). *Teknik Analisis Keberlanjutan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Febriani, Diah, and Jhon Andra Asmara. (2018). "Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Fungsi Pendidikan (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Aceh)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 3.4 : 585-599.
- Fitra, H. (2019). *Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*. Malang: IRDH
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS25*. Edisi Kesembilan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gomanee, K., Morrissey, O., Mosley, P., & Verschoor, A. (2003). "Aid, Pro-poor Government Spending and Welfare.". Centre for Research in Economic Development and International Trade, University of Nottingham.
- Gulliford, Martin, et al. (2002). "What Does' Access To Health Care'mean?." *Journal of health services research & policy* 7.3: 186-188.

- Gupta Sanjeev, Verhoeven Marijn, R. Tiongson Erwin. (2001). "*The Effectiveness Of Government Spending On Education And Health Care In Developing And Transition Economies.*" *European Journal of Political Economy*. Vol.18: 717–737. Elsevier.
- Hanifah, Nadine Brilliantia, Syamsurijal A. Kadir, dan Anna Yulianita. (2017). "Analisis Kausalitas antara Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sumatera." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 15.1: 15-34.
- Heller, P. S. (2003). *Who Will Pay? Coping with Aging Societies, Climate Change, and Other Long-Term Fiscal Challenges*. Peterson Institute for International Economics.
- Heriman, Heriman, Widyatmike Gede Mulawarman, Warman Warman. (2022). "Evaluation of the Budget Allocation Policy on Improving the Quality of High School and Vocational High School Education in Kutai Kartanegara Regency." *EduLine: Journal of Education and Learning Innovation*, 2(3), 297-311.
- Hirschman, M., & Firebaugh, G. (1975). "*The Social Meaning of Income.*" *Social Forces*, 53(2), 365-372.
- International Labour Organization. (2019). "*World Employment and Social Outlook: Trends 2019*". Geneva: ILO.
- Iskandar, Azwar. (2021). "Desentralisasi dan Efisiensi Belanja Fungsi Pendidikan serta implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan." *Info Artha*, 5(1), 11-24.
- Javarov, E dan Gunnarson, V. (2008). "*Government Spending on Health Care and Education in Croatia: Efficiency and Reform Option*".
- JhaRaghbendra, ANU, Canberra. (2001). "*An Empirical Analysis of the Impact of Public Expenditures on Education and Health on Poverty in Indian States.*" *Journal of Economic Studies*, Kingston University, Canada.
- Jhingan, M. L. (2000). "*Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan.*". Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Jung, Suhyun, Seong-Hoon Cho, and Roland K. Roberts. (2009). "*Public Expenditure and Poverty Reduction in the Southern United States.*" No. 1369-2016-108619.
- Kuncoro, Mudrajat. (2004). "*Otonomi & Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi Dan Peluang.*". Jakarta: Erlangga.

- Kutzin, Joseph. (2001). "A Descriptive Framework For Country-Level Analysis Of Health Care Financing Arrangements." *Health Policy*, 56(3), 171-204.
- Lengkong, Susye Marlen Ketsy, Debby Ch Rotinsulu, and Een N. Walewangko. (2019). "Pengaruh Alokasi Anggaran Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Bitung" *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 18(5).
- Mahendra, A. (2020). "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan, Inflasi Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Di Indonesia." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 1(1), 174-186.
- Mahuze, Wilhelmus, Vecky Masinambow, Agnes. (2022). "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Boven Digoel." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(3).
- Mangkoesobroto. (2001). "*Teori Ekonomi Makro*." Yogyakarta: STIE YTPN.
- Mardiana, Mardiana, Theresia Militina, Anis Rachma Utary. (2017). "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Serta Infrastruktur Terhadap Tingkat Pengangguran Serta Tingkat Kemiskinan." *Inovasi*, 13(1), 50-60.
- Maulana, Devitania. (2022). "Tinjauan atas Penyajian Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pendidikan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020." Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Mayasari, Ika. (2006). "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Keluarga (Studi Kasus pada Usaha Warung Apung di Kawasan Objek Wisata Rowo Jombor, Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten Tahun 2006)."
- Mongan, Jehuda Jean Sanny. (2019). "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia." *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 4(2), 163-176.
- Mulyaningsih, Yani. (2006). "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Publik Terhadap Peningkatan Pembangunan Manusia Dan Pengurangan Kemiskinan." Abstrak Tesis.
- Musta'in, Muhammad Mudjib, et al. (2022). "*Ekonomi Kreatif Berbasis Digital dan Kemandirian Masyarakat Era Society 5.0*." Surabaya: Global Aksara Pers.

- Ningtias, Lenna Marlina Supriati. (2017). "Tinjauan Anggaran Tunjangan Profesi Guru Terhadap Realisasi Anggaran Pada Dinas Pendidikan Kota Bandung Periode Tahun 2011-2016." Universitas Widyatama.
- Novitasari, Yuli, and Dila Hapitri. (2019). "Realisasi Belanja Pemerintah Sektor Kesehatan dan Pendidikan, serta Pengaruhnya terhadap IPM Kabupaten/Kota di Jawa Barat." *Cakrawala Repositori IMWI*, 2(1), 1-15.
- Nurmainah, Santi. (2013). "Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah, Tenaga Kerja Terserap Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Tengah)." *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 20(2), 131–41.
- Nurrizki, Anik. (2022). "Hubungan Alokasi Anggaran Pendidikan Dengan Kualitas Pendidikan Pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia Tahun 2015-2020." FKIP UNPAS.
- Pakaya, Nurain, Muhammad Amir Arham, and Frahmawati Bumulo. (2023). "Pengaruh Pengeluaran Dana Pendidikan, Dana Kesehatan, Dana Infrastruktur Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Di Provinsi Gorontalo." *Jurnal Studi Ekonomi dan Pembangunan*.
- Palenewen, Themby OM, Een N. Walewangko, and Jacline I. Sumual. (2018). "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Sektor Kesehatan Terhadap IPM Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Sulawesi Utara." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(4).
- Parera, Jemy Ricardo. (2022). "Efektivitas Kebijakan Fiskal Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Papua." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14(2), 114-130.
- Peacock, A. T., & Wiseman, J. (1961). *The Growth of Public Expenditure in the United Kingdom* (No. peac61-1). National Bureau of Economic Research.
- Prasetya, Ferry. (2012). "Teori Pengeluaran Pemerintah." *Modul Ekonomi Publik*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang.
- Priambodo, Anugrah, and Iswan Noor. (2016). "Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Pulau Jawa Tahun 2007-2013)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3(2).
- Priyadharsini, Swasthi Indira, et al. (2023). "Dampak Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di

- Sulawesi Tenggara." *JPEP (Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan)* 8.2 : 205-215.
- Priharta, Andry, et al. (2021). Tata Kelola Keuangan untuk Perguruan Tinggi dengan Sistem Informasi Realisasi Anggaran. *Global Aksara Pres*.
- Quang Dao, Minh. (2008). "Human Capital, Poverty, And Income Distribution In Developing Countries." *Journal of Economic Studies*, 35(4), 294–303. Emerald.
- Rafika, Ana Mei. (2017). "Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Se-Indonesia.". Universitas Lampung.
- Rokx, Claudia. (2009). "Health Financing in Indonesia: a Reform Road Map.". Washington DC: *World Bank Publications*.
- Saad, Wadad, and Kamel Kalakech. (2009). "The Nature Of Government Expenditure And Its Impact On Sustainable Economic Growth." *Middle Eastern Finance and Economics*, 1(4), 39-47.
- Saputra, D. N., Novita Listyaningrum, S. H., Leuhoe, Y. J., Apriani, S. S., Asnah, S. P., & Rokhayati, T. (2022). *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. Feniks Muda Sejahtera.
- Saputra, Whisnu Adhi. (2011). "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran, terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah." Skripsi Sarjana (Dipublikasikan) *Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang*.
- Sari, Dyah Wulan, and Rossanto Dwi Handoyo. (2019). "Alokasi Anggaran Publik Dan Pengentasan Kemiskinan Di Pulau Kalimantan." *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 4(4), 371-384.
- Sarifuddin, Abdul Jamil, and Iwan Erar Joesoef. (2023). "Implementasi Keadilan Sosial dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (Welfare State) Indonesia." *National Conference on Law Studies (NCOLS)*. Vol. 5. No. 1.
- Sayifullah, S., & Gandasari, T. R. (2016). "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten." *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(2).
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian, Edisi 6 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Smith, A. B. (2018). *Dimensions of Social Welfare Policy*. Cengage Learning.

- Smith, Kimberly V., and Sara Sulzbach. (2008). "Community-Based Health Insurance And Access To Maternal Health Services: Evidence From Three West African Countries." *Social Science & Medicine*, 66(12), 2460-2473.
- Solikin, Akhmad. (2018). "Pengeluaran Pemerintah Dan Perkembangan Perekonomian (Hukum Wagner) Di Negara Sedang Berkembang: Tinjauan Sistematis." *Info Artha*, 2(1), 65-89.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Suharto, Edi. (2008). "Islam dan Negara Kesejahteraan." Makalah pada Perkaderan Darul Arqam Paripurna (DAP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Jakarta 18, 1-12.
- Sukirno, S. (2000). "Makro Ekonomi Modern, Pengembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru." Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Susiana, Sali, ed. (2015). *Pembangunan Berkelanjutan: Dimensi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan*. P3DI Setjen DPR.
- Todaro, M., & Smith, S. (2015). "Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas Jilid 1". Jakarta: Erlangga.
- Todaro, Michael P., and Stephen C. Smith. (2009). "Pembangunan Ekonomi (Edisi Kesebelas, Jilid 1)." Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Republik Indonesia.
- UNDP. (1990). "Human Development Report 1990." United Nations Development Programme. Oxford University Press New York.
- United Nation Development Program. (2004). "The Economics Democracy: Financing Human Development in Indonesia." Published jointly by BPS – Statistic Indonesia.
- Usmaliadanti, Christiana, and Herniwati Retno Handayani. (2011). "Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009." *Diss. Universitas Diponegoro*.
- Wahyuni, Nurul. (2023). "Analisis Pengaruh Anggaran Belanja Fungsi Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Dan Perumahan/Fasilitas Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi." *Diss. Ekonomi Pembangunan*.

- Widodo, Edwin Rahmad. (2015). "Sistem Informasi Anggaran Kesehatan Swakelola Pegawai Dan Keluarga Pdam Tirta Moedal Kota Semarang." *Dinamika Informatika*.
- World Health Organization. (2018). "*Health Financing For Universal Coverage*." Geneva: World Health Organization.
- Yulianita, A., & Marissa, F. (2020). Penerapan Aplikasi Software Pada Penelitian Ilmiah. Unsri Press.
- Yunus, Rita, and Anas Iswanto Anwar. (2021). "*Ekonomi Publik*." Penerbit NEM.